

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bemmelen, Van, 1984, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.
- Doened, Marwati dan Notosusanto, Nugroho, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2010, *Peradilan In absensia dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Henianti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kadi, Saurip, 2000, *TNI Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salam, M. Faisal, 2006, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sianturi, S.R., 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

_____, S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

_____, S.R., 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Soebijono, et al., 1997, *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Bandung.

B. Artikel Jurnal/Karya Ilmiah

Andrizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

Darmawan, Dedy, “Problematisa Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Militer Dalam Perkara Desersi Secara *In Absentia*”, *Jurnal Hukum Media Justitia*, Vol. 9, No. 1 Februari 2019.

H., Agustinus, P., “Pembaruan Hukum Pidana Militer sebagai Bagian dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol.3, No.1, Maret 2023.

Mulyono, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (Pasal 86 KUHPM)”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol.4, No.1, Juni 2019.

Purnomo, Joko, “Pembaharuan Hukum Pidana Militer (Masih Perlukah Pasal 24 KUHPM dipertahankan)”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol.4, No.1, Juni 2019.

S., Tri Agus, “Penyelesaian Perkara Desersi Secara In absensia di Peradilan Militer dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol.3, No.1, Maret 2023.

Santoso, *et al.*, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia”, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023.

Sinamo, *et al.*, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai (Studi Putusan Nomor 22-K/PM.I-01/AD/IV/2020)”, *Juncto*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.

Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, “Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer”, *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2018.

Sulistiyo, *et al.*, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi”, *Qiyas*, Vol. 8, No. 1 April 2023.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Aisyah, Felia Primanda, 2023, “Penjatuhan Pidana Pemecatan dari Dinas Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Amalia, Winda Hayu, 2023, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Alfarizi, Zilma Fikri, 2017, “Pemeriksaan In absensia Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Peradilan Militer (Studi di Pengadilan Militer

III-12 Surabaya)”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Fikri, M. Ali dan Pudji Astuti, 2018, “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Desersi yang Diputus Secara In Absensia Sebelum Jangka Waktu 6 Bulan”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Hutahaean, Darwin, 2020, “Penyelesaian Secara In absensia Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Siregar, Rayni Wulansuci, 2011, “Peran dan Fungsi TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)”, *Tesis*, Program Studi Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Susanti, Riesa Susanti, 2011, “Peradilan In absensia dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. Internet

Binus University, 2016, “Asas Legalitas”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>, diakses 26 Januari 2024.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2023, “Apa itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)”, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#:~:text=SEMA%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20yang,lembaga%20peradilan%20tertinggi%20di%20Indonesia,> diakses 21 Januari 2024.

Merdeka.com, 2022, “Panglima TNI Sebut Ada Kenaikan Pelanggaran Disiplin hingga Desersi Prajurit”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/panglima-tni-sebut-ada-tren-kenaikan-pelanggaran-disiplin-hingga-desersi-prajurit.html>, diakses pada 7 Januari 2024.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 2024, “Tentang Peradilan Militer”, <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/>, diakses pada 22 Juni 2024.

Pusat Penerangan TNI, 2023, “Sejarah TNI”, [WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA \(tni.mil.id\)](http://www.tni.mil.id), diakses pada 24 November 2023.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5591).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2595).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 50).

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 362).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 49-K/PM.II-11/AU/X/2023 atas nama terdakwa dengan inisial AM.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 26-K/PM.II-11/AD/VI/2023 atas nama terdakwa dengan inisial AWH.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 19-K/PM.II-11/AD/V/2021 atas nama terdakwa dengan inisial HAP.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 4-K/PM.II-11/AD/II/2021 atas nama terdakwa dengan inisial HHSE.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 2-K/PM.II-11/AD/I/2021 atas nama terdakwa dengan inisial SE.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 38-K/PM.II-11/AD/X/2020 atas nama terdakwa dengan inisial S.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 35-K/PM.II-11/AD/IX/2020 atas nama terdakwa dengan inisial MH.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 41-K/PM.II-11/AU/V/2019 atas nama terdakwa dengan inisial DAD.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 64-K/PM.II-11/AD/X/2018 atas nama terdakwa dengan inisial YY.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 39-K/PM.II-11/AD/VII/2018 atas nama terdakwa dengan inisial AS.